

Lahan warga tergusur Jalan Tol Cinere-Jagorawi Walikota Depok diminta turun tangan



Wali Kota Depok
Nur Mahmudi Ismail

DEPOK (Pos Kota) – Anggota DPRD Depok meminta Walikota Nur Mahmudi Ismail mencari solusi hukum terkait pembayaran lahan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum) di Kecamatan Cimanggis yang kena pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi I.

Karno, anggota DPRD

Depok Dapil Cimanggis, menyarankan walikota meminta fatwa Mahkamah Agung karena tidak adanya bukti otentik lahan fasos-fasum seluas 20.720 meter senilai Rp41,211 miliar. “Kami hanya menginginkan *win win solution*, warga tidak dirugikan dan Pemkot mendapat manfaat,” katanya dalam Sidang Paripurna I/2013 DPRD Depok yang dihadiri Walikota Mahmudi. “Tuntutan warga itu karena dijanjikan walikota sebelumnya, jadi wajar kalau ditagih.”

Menurutnya, polemik bermula saat PT Trans Lingkar Jaya sebagai pengembang jalan Tol Cijago siap membayarkan tuntutan fasos-fasum itu. Syaratnya, ada bukti otentik itu milik Pemkot Depok bersamaan muncul-

nya Surat Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail No 902/101/Aset pada 26 Januari 2010. Apalagi Pemkot Depok berkilah kompensasi itu untuk pembangunan Islamic Centre, taman kota, sport centre dan Usaha Kecil Menengah (UKM) seluas 6 hektar, pembangunan pasar induk di Kecamatan Tapos seluas 5 hektar serta pelebaran jalan masuk ke Pekapuran.

Menanggapi ini, Ketua DPRD, Rintisyanto, berjanji memperjuangkan aspirasi warga Cimanggis. “Kami ini wakil rakyat, bukan hanya warga Cimanggis, tapi seluruh warga Depok seperti yang diusulkan rekan wakil rakyat saat masa reses kemarin, sebagai masukan untuk membuat kebijakan publik,” katanya. (rinaldi/yp)